

Diskusi Dwi Bulanan INDEF

**“Menyoal Efektifitas APBN-P 2014 Mengatasi
Perlambatan Ekonomi”**

Selasa, 20 Mei 2014

INDEF

Diskusi Dwi Bulanan INDEF

“Menyoal Efektifitas APBN-P 2014 Mengatasi Perlambatan Ekonomi”

Selasa, 20 Mei 2014

Rutinitas pembahasan APBN-P kembali berulang. Hampir setiap pertengahan tahun APBN senantiasa dilakukan revisi. Tak terkecuali hari ini, 20 Mei 2014, Pemerintah kembali mengajukan APBN-P 2014 ke DPR. Penyebabnya hampir bisa dipastikan bahwa asumsi makroekonomi dalam APBN yang telah disepakati sendiri oleh Pemerintah dan DPR meleset dari target. Padahal APBN mempunyai peran dan fungsi strategis, tidak saja sebagai dokumen perencanaan tapi merupakan cerminan dari politik anggaran dan arah kebijakan fiskal. Sementara asumsi merupakan dasar menyusun kebijakan dan menentukan target pembangunan yang akan dicapai. Jika menyusun asumsi saja selalu tidak tepat maka bagaimana APBN bisa diharapkan efektif berperan sebagai stimulus kinerja perekonomian dan mencapai target pembangunan?.

Ekonomi tentu selalu mengalami dinamika, baik berasal dari pengaruh perubahan faktor internal maupun eksternal. Namun demikian, hampir semua perubahan-perubahan variabel ekonomi adalah terukur, walaupun tentu tidak ada sesuatu yang pasti. Oleh karenanya, esensi keberadaan APBN mestinya justru harus menjadi instrumen dalam mengantisipasi dan memitigasi berbagai potensi fluktuasi dan instabilitas perekonomian. APBN harus merefleksikan arah kebijakan fiskal dalam mengoptimalkan fungsi alokasi produksi, stabilisasi, dan pemerataan pembangunan ekonomi.

Dengan demikian, jika Pemerintah dan DPR sepakat melakukan revisi APBN 2014 maka titik tolak pembahasannya adalah bagaimana APBN-P 2014 harus mampu merespon persoalan perekonomian selama semester pertama 2014 dan efektif mengoptimalkan kinerja ekonomi kedepan. Persoalan kinerja ekonomi awal 2014, tidak saja persoalan buruknya kualitas pertumbuhan ekonomi namun juga dihadapkan pada melambatnya angka pertumbuhan. Triwulan I 2014, ekonomi hanya tumbuh 5,21%.

Merespon kondisi tersebut, Diskusi Dwibulanan INDEF dimaksudkan memberikan masukan kepada Pemerintah dan DPR, utamanya agar pembahasan APBN-P 2014 tidak sekedar berhenti hanya membahas persoalan membengkaknya subsidi BBM akibat asumsi nilai tukar yang meleset dan potensi membengkaknya defisit APBN. Untuk itu INDEF merekomendasikan 10 kebijakan agar pembahasan APBN-P-2014 dapat fokus pada optimalisasi peran stimulus fiskal.

1. Reformasi Sumber Pertumbuhan Ekonomi

- i. Perlambatan angka pertumbuhan ekonomi harus dijadikan momentum untuk memperbaiki kualitas pertumbuhan ekonomi. Karena sumber perlambatan adalah menurunnya pertumbuhan sektor tradable (sektor riil), utamanya adalah sektor industri, pertanian dan pertambangan.
- ii. Stimulus fiskal harus fokus untuk membalik sumber pertumbuhan dari dominasi sektor non tradable beralih menggerakkan sektor riil, melalui berbagai insentif fiskal (*tax holiday* maupun *tax allowance*) maupun realisasi kongkrit dari paket-paket ekonomi yang diluncurkan Pemerintah.
- iii. Akselerasi sektor industri dapat dilakukan dengan mempercepat insentif terhadap hilirisasi industri yang berbasis pertanian maupun pertambangan dibarengi konsistensi kebijakan pelarangan ekspor bahan mentah.
- iv. Oleh karenanya harus ada politik anggaran yang nyata untuk mendorong akselerasi pertumbuhan sektor riil dalam APBN-P 2014 melalui percepatan penyerapan anggaran pada triwulan III 2014.

2. Exit Policy dari Sandera Subsidi Energi

- i. Melesetnya asumsi nilai tukar rupiah hampir bisa dipastikan berdampak pada pembengkakan subsidi BBM.
- ii. Harus ada keberanian dari Pemerintah untuk mengurangi subsidi BBM, yang disertai langkah antisipasi dan mitigasi resiko yang komprehensif.
- iii. Langkah antisipapasi dari sisi pasokan adalah segera mengalokasikan anggaran yang konkrit untuk pembangunan infrastruktur gas dan memberikan isentif investasi pada energi alternatif seperti biodiesel.
- iv. Memprioritaskan pemanfaatan sumber daya minyak dan gas untuk pemenuhan kebutuhan energi nasional.
- v. Menejemen dari sisi Permintaan adalah dengan perbaikan kualitas pelayanan transportasi umum.

3. Efektifitas Pergeseran dan Realokasi Anggaran

- i. Konsep pergeseran anggaran belanja bukan pemotongan namun efisiensi belanja. Jadi pemotongan tidak dilakukan secara pukul rata terhadap setiap kementerian, namun dilakukan secara selektif.

- ii. Realokasi anggaran tidak berdampak pada pengurangan program dan kegiatan produktif. Sehingga tidak akan mengganggu pencapaian target pembangunan.
- iii. Anggaran yang dapat direalokasi adalah anggaran yang dapat diefisienkan, seperti perjalanan dinas, belanja operasional, sosialisasi, manajemen, rapat, dsb.
- iv. Pergeseran bukan berasal dari belanja yang tidak mengikat seperti belanja modal utamanya belanja pembangunan infrastruktur.

4. Optimalisasi Anggaran Pro Job dan Pro Poor

- i. Penurunan angka pertumbuhan ekonomi pasti berdampak pada elastisitas penyerapan tenaga kerja. Oleh karenanya akselerasi pertumbuhan sektor padat karya harus segera dilakukan.
- ii. Kebijakan-kebijakan yang berpotensi berdampak mendegradasi dan memicu PHK pada industri padat karya harus segera dikaji ulang.
- iii. Efektifitas anggaran bansos fokus untuk mitigasi meningkatnya angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan
- iv. Adanya koordinasi dan sinergi dari program-program pengentasan kemiskinan yang tersebar di semua kementerian dibawah koordinasi Menkokesra.

5. Stimulus Sektor UKM

- i. Pemberian kredit lunak kepada UKM melalui peningkatan KUR utamanya ke sektor produktif seperti Industri Kecil dan Mikro serta sektor pertanian harus ditingkatkan.
- ii. Ironisnya, target penyaluran KUR hingga Maret 2014 masih dibawah 25%. Dari pagu sekitar Rp.37 triliun baru terserap Rp.8,6 triliun.
- iii. Dominasi kredit KUR saat ini adalah sektor perdagangan, yaitu mencapai Rp. 82,3 triliun dengan jumlah debitur UKM sebesar 6,9 juta debitur.
- iv. Sektor pertanian baru mendapat alokasi sebesar Rp. 25,2 triliun dengan jumlah debitur mencapai 1,65 juta debitur. Padahal sektor Pertanian merupakan salah satu sektor penyerap tenaga kerja yang seharusnya diberikan porsi lebih besar daripada sektor perdagangan.

6. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur

- i. Percepatan penyerapan belanja modal, terutama pembangunan infrastruktur ekonomi .
- ii. Mengefektifkan alokasi dana transfer daerah, melalui realokasi Dana Alokasi Khusus fokus untuk pembangunan infrastruktur.

7. Mitigasi Defisit Neraca Perdagangan

- i. Ancaman tekanan defisit neraca perdagangan masih terbuka, terutama berasal dari tekanan impor migas dan menurunnya daya saing ekspor komoditas industri.
- ii. Memberikan fasilitas promosi dan insentif fiskal untuk industri yang berorientasi ekspor.
- iii. Stimulus fiskal untuk mendorong industri substitusi impor mutlak dilaksanakan.

8. Efisiensi Belanja Birokrasi

- i. Membengkaknya porsi belanja birokrasi terutama berasal dari gaji pegawai dan belanja barang berdampak pada pengurangan porsi ruang fiskal atau belanja yang tidak mengikat
- ii. Reformasi birokrasi mutlak dilakukan oleh kementerian pendayagunaan aparatur negara, baik melalui skema moratorium PNS secara selektif maupun evaluasi sistem penerimaan pegawai Pemda.
- iii. Harus ada transparansi pengelolaan dana pensiun untuk mencegah besarnya pembengkakan dana pension tiap tahunnya.

9. Optimalisasi Anggaran Ketahanan Pangan

- i. Ketahanan pangan berkontribusi besar terhadap pengendalian inflasi.
- ii. Peningkatan anggaran untuk meningkatkan produktifitas pertanian tanaman pangan, utamanya melalui perbaikan infrastruktur irigasi.
- iii. Pemberian subsidi langsung petani yang tepat sasaran (tepat waktu, tepat guna dan tepat kualitas)
- iv. Alokasi anggaran untuk menjalankan peran intervensi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan komoditas pangan strategis, melalui fungsi buffer stock.

10. Optimalisasi Penerimaan Negara

- Masalah klasik APBN masih rendahnya *tax ratio*. Harus ada peningkatan target tax ratio mencapai minimal 14%.
- Peningkatan penerimaan negara dapat berasal dari pajak maupun non pajak, seperti peningkatan objek dan tarif cukai, pajak progresif untuk kepemilikan properti dan sebagainya.
- Mengoptimalkan target pelunasan piutang pajak.